



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Jalan Siliwangi No. 9 Purwakarta 41111
Telp (0264) 8304884, 8227888; Faks (0264) 8225765; situs: djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-52/KNL.0804/2025

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 KPKNL Purwakarta
Tanggal : 21 Januari 2025

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat nomor ND-49/WKN.08/2025 tanggal 8 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 serta nota dinas Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Nomor ND-4705/KN.1/2024 tanggal 15 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPKNL Purwakarta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LAKIN) tersebut juga kami sampaikan melalui tautan https://bit.ly/LakinJabar_2024.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta berkomitmen mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam keseharian agar terwujud pelayanan yang bersih, akuntabel, inovatif, dan konsisten.

Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Harmani Sri Mumpuni

Tembusan:

1. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
2. Kepala Seksi Kepatuhan Internal





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG
PURWAKARTA**



PENGANTAR

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kanwil DJKN Jawa Barat telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan nota dinas Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Nomor ND-4705/KN.1/2024 tanggal 15 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 serta nota dinas Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat nomor ND-49/WKN.08/2025 tanggal 8 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024.

Pencapaian akuntabilitas kinerja KPKNL Purwakarta saat ini tidak terlepas dari berbagai hambatan/kendala baik kendala yang berasal dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara lebih terarah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Purwakarta. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus menerus. Dengan semangat reformasi birokrasi dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini tidak terlepas dari bantuan dan pemikiran berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran KPKNL Purwakarta yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Purwakarta
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Harmani Sri Mumpuni



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	2
 BAB I PENDAHULUAN	 3
A. Tugas, Fungsi, Visi, dan Misi KPKNL Purwakarta.....	4
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	6
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	8
1. Permasalahan di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.....	8
2. Permasalahan di Seksi Pengurusan Piutang Negara	8
3. Permasalahan di Pelayanan Penilaian	8
4. Permasalahan di Pelayanan Lelang.....	9
5. Permasalahan di Seksi Hukum dan Informasi	9
6. Permasalahan di Seksi Subbagian Umum	9
7. Permasalahan di Seksi Kepatuhan Internal.....	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 11
A. Rencana Strategis	12
B. Penetapan Kinerja	14
C. Addendum Kontrak Kinerja.....	20
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Kinerja Lainnya.....	55
C. Realisasi Anggaran	61
 BAB IV PENUTUP	 62

BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan menerapkan reformasi birokrasi sesuai amanat peraturan perundangan, memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

Mengingat sangat pentingnya peran tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, sebagai instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa (*stakeholder*), terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Di samping itu, upaya peningkatan pelayanan dan kinerja dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif sehingga terwujud pelayanan terbaik dan sikap kerja yang profesional, akuntabel, transparan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi sehingga dapat menjadi kantor pelayanan yang dibanggakan oleh masyarakat.

Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh KPKNL Purwakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja diantaranya melaksanakan secara konsisten berbagai kebijakan terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 55/KMK.01/2020 tentang Program Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2020 -2024.
5. Keputusan Menteri Keuangan nomor 56/PMK.01/2021 tentang Pedoman standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor: Kep-60/KN/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan negara

Di samping hal-hal tersebut di atas, KPKNL Purwakarta sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peranan KPKNL dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara.

A. TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI KPKNL PURWAKARTA

KPKNL Purwakarta yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 9 Kabupaten Purwakarta merupakan unit vertikal DJKN Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dalam rangka mendukung visi dan misi DJKN sebagai pengelolaan kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dengan total luas wilayah seluas 4.776,75 Km². Stakeholder yang dilayani KPKNL Purwakarta yaitu

- Untuk Pengelolaan Kekayaan Negara sejumlah 92 satker
- Pelayanan Penilaian sejumlah 92 satker dan 3 pemerintah daerah
- Pelayanan Lelang kami melayani dari perbankan dan non perbankan termasuk pembeli lelang
- Piutang Negara kami mengurus piutang negara macet dari instansi pemerintah pusat dan daerah

KPKNL Purwakarta berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, maupun dalam melakukan pengamanan kekayaan negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara dan sertifikasi tanah pemerintah (Penertiban Barang Milik Negara). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Purwakarta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan guna mewujudkan reformasi birokrasi berkesinambungan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka memberikan arah, inspirasi, serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL Purwakarta memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”.

MISI

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam tatanan operasional, visi dan misi tersebut akan terus diupayakan untuk dicapai. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Purwakarta telah memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan motto **”BAIK”**.

Bersih : Bekerja dengan ikhlas, tanpa pamrih dalam melayani stakeholder.

Akuntabel : Hasil Kerja dapat dipertanggung jawabkan secara transparan sesuai dengan ketentuan.

Inovatif : Selalu menemukan cara baru dalam bekerja untuk menghadapi dinamika organisasi.

Konsisten : Bekerja dengan baik secara terus menerus dalam kondisi apapun.

Melalui motto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Purwakarta dalam melaksanakan tugas bergerak bersama ke arah yang lebih baik dalam segala aspek sesuai Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Berdasarkan **Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**, KPKNL

Purwakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Purwakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, Pengadministrasian, Pendayagunaan, Pengamanan Kekayaan Negara;
2. Registrasi, Verifikasi Dan Analisa Pertimbangan Permohonan Pengalihan Serta Penghapusan Kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
5. Pelaksanaan Pelayanan Penilaian;
6. Pelaksanaan Pelayanan Lelang;
7. Penyajian Informasi di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara Dan Lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran Piutang Negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

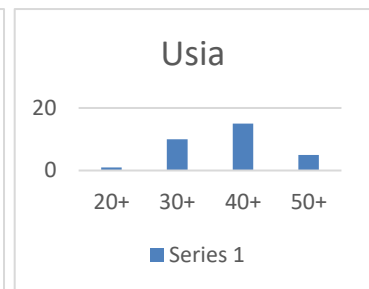
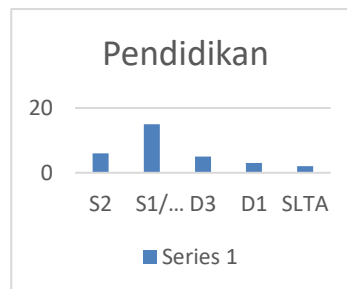
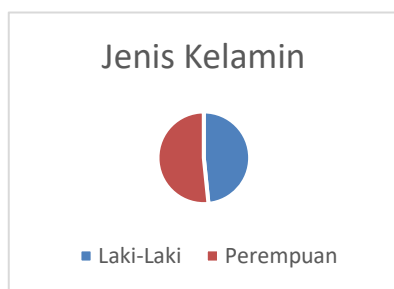
Struktur organisasi pada KPKNL Purwakarta adalah sebagai berikut :



Rincian sumber daya manusia pada KPKNL Purwakarta adalah sebagai berikut:

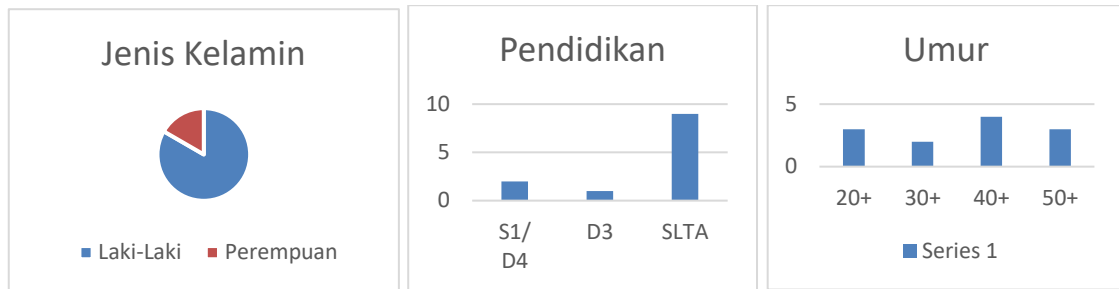
A. ASN sebanyak 31 Pegawai

- Menurut Jenis Kelamin:
terdiri dari 15 orang pegawai laki-laki dan 16 orang pegawai perempuan
- Menurut Tingkat Pendidikan:
Pendidikan S2 6 orang pegawai
Pendidikan S1/DIV 15 orang pegawai
Pendidikan D3 5 orang pegawai
Pendidikan D1 3 orang pegawai
Pendidikan SLTA/Sederajat 2 orang pegawai
- Menurut tingkatan usia:
Usia 50 tahun keatas 5 orang pegawai
Usia 40-49 tahun 15 orang pegawai
Usia 30-39 tahun 10 orang pegawai
Usia 20-29 tahun 1 orang pegawai



B. PPNPN sebanyak 12 pegawai

- Menurut Jenis Kelamin:
terdiri dari 10 orang pegawai laki-laki dan 2 orang pegawai perempuan
- Menurut Tingkat Pendidikan:
Pendidikan S1/DIV 2 orang pegawai
Pendidikan D3 1 orang pegawai
Pendidikan SLTA/Sederajat 9 orang pegawai
- Menurut tingkatan usia:
Usia 50 tahun keatas 3 orang pegawai
Usia 40-49 tahun 4 orang pegawai
Usia 30-39 tahun 2 orang pegawai
Usia 20-29 tahun 3 orang pegawai



C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*business process*) untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, KPKNL Purwakarta mengalami beberapa kendala/permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara serta pencapaian target kinerja terkait pengelolaan kekayaan negara yang isu utama, diantaranya: Pencapaian target IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan Pencapaian IKU ini diperkirakan akan cukup sulit dengan besaran jumlah target yang cukup besar dan permasalahan belum *clean and clear*-nya berkas sertipikasi tanah dimaksud terutama pada satuan kerja BBWS dan DJKA.

2. Permasalahan pada Seksi Piutang Negara

Target penurunan outstanding piutang negara adalah penurunan nilai outstanding piutang negara yang sebagian besar merupakan BKPN dimana Penanggung Hutang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang ataupun tingkat kemampuan Penanggung Hutang yang rendah. Di samping itu, sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang tidak potensial (barang jaminan tidak *marketable* ataupun bermasalah) maupun BKPN yang sudah tidak memiliki barang jaminan.

3. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Penilaian

Dalam pelaksanaan proses penilaian masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:

- Terdapat permohonan penilaian Non-BMN dengan jumlah objek yang banyak yang masuk dalam waktu yang bersamaan dengan permohonan penilaian BMN, sehingga menyebabkan waktu pengerjaan laporan yang terbatas.
- Keterbatasan data pasar yang tersedia di lapangan untuk proses penyusunan karena masyarakat belum terbuka terhadap transaksi tanah.

4. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Lelang

Dalam pelaksanaan pelayanan lelang serta pencapaian target kinerja di bidang lelang, terdapat permasalahan, diantaranya: Pencapaian target pokok lelang dan PNPB dari bea lelang menjadi perhatian karena seringkali terkendala rendahnya hasil penjualan secara lelang ditandai dengan masih banyaknya lelang Tidak Ada Peminat (TAP) yang berasal dari jenis lelang eksekusi Hak Tanggungan permohonan Perbankan dan lelang eksekusi pailit yang kurang peminat, calon pembeli belum siap, juga obyek lelang yang kurang *marketable*. Di samping itu masih banyak terjadi proses Lelang Batal yang disebabkan permohonan batal oleh penjual maupun yang dibatalkan karena persyaratan lelang tidak lengkap/tidak terpenuhi.

5. Permasalahan pada Seksi Hukum dan Informasi

Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Hukum dan Informasi secara umum, sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengembalian uang jaminan lelang, masih terdapat peserta lelang mencantumkan nomor rekening, nama rekening dan nama Bank yang salah, sehingga menghambat Bendahara Penerima dalam pengembalian tepat waktu dan akhirnya terjadi miskomunikasi antara peserta lelang tersebut dengan Bendahara Penerima, selain itu masih terdapat beberapa peserta lelang yang tidak mencantumkan nomor telepon sehingga apabila terdapat kendala dalam pengembalian uang jaminan lelang tidak bisa melakukan konfirmasi ke peserta lelang yang bersangkutan.
- b. Tidak adanya pernyataan yang jelas pada penggunaan NPWP untuk penyetoran PPh final pada transaksi lelang, mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran penggunaan NPWP pada masing-masing KPKNL. Hal tersebut juga dilatarbelakangi karena perbedaan kebijakan dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya sehingga Bendahara Penerimaan mengalami hambatan setiap akan menyetorkan PPh Final yang berasal dari transaksi lelang.

6. Permasalahan pada Subbagian Umum

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum serta dalam pencapaian target kinerja di Subbagian Umum, permasalahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, diantaranya:

- a. Kendala pada ketersediaan SDM pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengemban tugas pada Jabatan Fungsional Bendahara dan Penata Laksana Barang. Jabatan Bendahara, apabila bukan diemban oleh jabatan fungsional maka harus diemban oleh pegawai yang telah mengikuti diklat dan berstatus BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi). Tusi bendahara yang bersifat spesifik, sangat terpengaruh oleh

adanya mutasi pegawai. Apabila terdapat mutasi keluar jafung bendahara dan tidak digantikan juga oleh jafung bendahara, membutuhkan waktu penyiapan pegawai untuk mengikuti diklat bendahara dan proses sertifikasi bendahara. Selain bendahara, tusi lain yang semakin khusus, adalah penata laksana BMN. Saat ini penatalaksanaan BMN dilakukan oleh pegawai yang bukan Jafung Penata Laksana Barang.

- b. Ada syarat tertentu yang harus dimiliki oleh suatu pemegang jabatan di mana mereka harus mengikuti diklat untuk menunjang kemampuan menjalankan tugas. Sebagai contoh untuk Pejabat Penguji SPM yang dahulu dijabat oleh Kasubbag Umum secara *ex officio*, saat ini harus mengikuti diklat Penguji SPM yang keikutsertaannya menunggu dalam waktu yang lama karena keterbatasan kuota peserta. Perlu adanya terobosan agar Kasubbag Umum yang belum mengikuti diklat PPSPM dapat diprioritaskan untuk bisa memenuhi syarat sebagai Pejabat Penguji SPM.
- c. Pencapaian indikator kinerja Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tidak maksimal yang disebabkan pelaksanaan realisasi anggaran yang sempat tertunda karena time line pengerjaan belanja modal yang bergeser jadwal. Rencana Penarikan Dana (RPD) yang dijadwalkan bulan Maret untuk pembayaran belanja modal mundur di bulan Mei karena pembayaran atas kontrak juga mundur yang berakibat nilai IKPA menjadi berkurang karena ketidaksesuaian RPD.

7. Permasalahan pada Seksi Kepatuhan Internal

Isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Kepatuhan Internal, yaitu:

- a. Peraturan dan pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pada Seksi Kepatuhan Internal secara dinamis mengalami perubahan dari Kantor Pusat DJKN sehingga memerlukan penyesuaian yang cepat dan tepat dalam pelaksanaannya.
- b. Adanya kepentingan dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPKNL menyebabkan kemungkinan adanya moral hazard atau konflik kepentingan yang dapat menghambat kelancaran tugas, sehingga diperlukan integritas dan penerapan prinsip kehati-hatian.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023, telah disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Purwakarta Tahun 2024 yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

A. Rencana Strategis

1. Misi

Misi KPKNL Purwakarta adalah :

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik administrasi dan hukum.
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna.

2. Tujuan

KPKNL Purwakarta mempunyai tujuan organisasi yakni mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggungjawab, profesional dan dipercaya masyarakat pengguna jasa di wilayah kerja KPKNL Purwakarta.

3. Sasaran

Sasaran yang hendak dituju KPKNL Purwakarta adalah :

- 1) Perwujudan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- 2) Pengamanan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
- 3) Perwujudan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- 4) Pelaksanaan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 5) Perwujudan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna, efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif.

4. Kebijakan

Kebijakan adalah implementasi dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kebijakan-kebijakan KPKNL Purwakarta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pekerjaan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan monitoring pelaksanaan diklat wajib, mengajukan diklat yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*.
- 3) Menerapkan standarisasi kerja yang berbasis pada integritas, ketulusan dan komitmen.
- 4) Menerapkan percepatan proses di bidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian.
- 5) Menerapkan sistem aplikasi di bidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian yang berbasis pada teknologi informasi.
- 6) Meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan informasi yang meliputi percepatan proses penyelesaian perkara di pengadilan (litigasi) dan pemberian keterangan atau informasi kepada pihak terkait.

5. Program Kerja

Program kerja yang ditetapkan KPKNL Purwakarta tidak terlepas dari kebijakan yang telah diambil dan menjadi acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Program kerja KPKNL Purwakarta meliputi program kerja yang terurai kedalam program kerja masing-masing unit kerja. Berikut Program Kerja KPKNL Purwakarta :

- **Pelayanan di bidang Lelang**

- a. Memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa lelang;
- b. Memberikan konsultasi kepada *stakeholder* tentang peraturan, syarat dan prosedur lelang;
- c. Melaksanakan lelang online secara optimal;
- d. Mempercepat proses penyelesaian Risaiah Lelang baik minuta, kutipan maupun salinan tepat waktu;
- e. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemohon lelang;
- f. Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

- **Pelayanan di Bidang Pengurusan Piutang Negara**

- a. Mempercepat proses pengurusan Piutang Negara untuk berkas kasus Piutang Negara yang baru diserahkan;

- b. Melakukan kegiatan bersifat persuatif guna menggugah kesadaran debitur agar mau mengangsur hutang mengingat kegiatan eksekusi sudah tidak dapat dilakukan;
 - c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan penyerah piutang dan pihak-pihak terkait;
 - d. Menyampaikan laporan yang benar, cepat dan akurat.
- **Pelayanan di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara**
 - a. Memberikan pelayanan prima dengan memberikan pengarahan dan perbantuan optimal dalam implementasi program SIMAN;
 - b. Mempercepat proses permohonan utilisasi dengan tidak mengurangi kecermatan dan kelengkapan berkas permohonan;
 - c. Mengelola kekayaan negara dengan efektif dan efisien;
 - d. Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;
 - e. Sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penyelesaian pensertipikatan BMN berupa tanah.
- **Pelayanan di Bidang Penilaian**
 - a. Memberikan layanan penilaian yang aktif dan solutif;
 - b. Mempercepat penyelesaian laporan penilaian yang berkualitas;
 - c. Mewujudkan pelaksanaan penilaian yang akuntabel yang tercermin melalui ketergunaan hasil penilaian dalam Keputusan Pengelolaan BMN.
- **Pelayanan di Bidang Hukum dan Informasi**
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Bendahara Penerimaan secara optimal
 - b. Memberikan pelayanan yang optimal dalam setiap permohonan verifikasi jumlah hutang dalam rangka penerbitan SPPNS, SPPNL dan PSBDT;
 - c. Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan layanan hukum yang efektif;
 - d. Memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi;
 - e. Menerapkan aplikasi Sibankum;
 - f. Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

- **Pelayanan di Bidang Umum**

- a. Memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh unit kerja KPKNL Purwakarta dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara maksimal;
- b. Memberikan dorongan pembentukan SDM yang berintegrasi dan berkompetensi tinggi;
- c. Mengelola anggaran dengan optimal;
- d. Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

B. Penetapan Kinerja

1. Perjanjian Kinerja

Mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggung jawab, profesional dan dipercaya masyarakat di wilayah kerja KPKNL Purwakarta merupakan misi KPKNL Purwakarta. Untuk mewujudkan misi tersebut, dibuatlah perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat selaku pejabat tertinggi di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat dengan Kepala KPKNL Purwakarta. Dalam perjanjian kinerja tersebut memuat butir-butir yang telah ditetapkan dalam garis besar peta strategi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yaitu:

- 1). Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
- 2). Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
- 3). Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal;
- 4). Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;
- 5). Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif;
- 6). Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif;
- 7). Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
- 8). Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
- 9). Pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- 10). Komunikasi publik yang efektif;
- 11). Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Purwakarta:

- 1). Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
- 2). Indeks integritas;

- 3). Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan;
- 4). Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN;
- 5). Persentase realisasi pokok lelang;
- 6). Persentase penurunan outstanding Piutang Negara;
- 7). Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian;
- 8). Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan;
- 9). Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset):
- 10). Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara;
- 11). Persentase produktivitas lelang;
- 12). Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian;
- 13). Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
- 14). Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko;
- 15). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran;
- 16). Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN;
- 17). Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID);
- 18). Indeks efektivitas UKI;
- 19). Tingkat capaian Unit Kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM.

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp18,27M)
		1b-CP Indeks integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp269,4M)
		3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp200jt)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	86 (25 berkas)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas UKI	82
		11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		Rp	449.966.000
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	6.275.000
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	-
3.	Pengelolaan Aset	Rp	443.691.000
4.	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp	-
5.	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	-
6.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	-
Dukungan Manajemen		Rp	2.565.953.000
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	29.640.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.487.033.000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	32.920.000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	-
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	16.360.000
6.	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp	-

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Barat

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Purwakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Tavianto Noegroho



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahjudi Prajogo

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 September s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Harmani Sri Mumpuni, S.H., M.H.	NAMA	Tugas Agus Priyo Waluyo	
NIP	196811081993032001	NIP	196508281991031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Penerima Layanan
6.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan
7.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	Penerima Layanan
8.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
9.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100	Proses Bisnis
10.	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	86	Proses Bisnis
11.	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase produktivitas lelang	89	Proses Bisnis
12.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	Proses Bisnis
13.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	Penguatan Internal atau Anggaran
14.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Indeks kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

16.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Indeks Efektivitas UKI	85	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

2 September 2024

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,



C. Addendum Kontrak Kinerja

1. Target Penurunan Outstanding Piutang Negara tahun 2024 adalah sebesar Rp200.000.000,00 dan telah tercapai pada triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar Rp425.875.835,00. Karena target penurunan outstanding Piutang Negara sudah tercapai di triwulan II, maka dilakukan addendum target dari Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp878.500.000.000,00.

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-4B/WKN.08/2024

Pada hari ini, telah disepakati addendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-4/WKN.08/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen addendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-4A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula		Menjadi	
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (200 jt)	3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (879 jt)

B. Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Utama

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sm t.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100 (200 jt)	3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100 (879 jt)

Bandung, 18 September 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat,

Kepala KPKNL Purwakarta



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



Ditandatangani secara elektronik
Harmani Sri Mumpuni

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja KPKNL Purwakarta yang dituangkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencatat kenaikan dari tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2024 sebesar **110,79%** dibandingkan tahun 2023 sebesar **110,37%**. Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta dalam 5 (lima) tahun adalah, sebagai berikut:



Pada Tahun Anggaran 2024, KPKNL Purwakarta secara umum telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **110,79%** dengan catatan terdapat 2 (dua) IKU yang masih sedikit belum mencapai target. Lebih jelasnya dibawah ini adalah gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2024:

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)	30%						29,36%	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							97,87%	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	90,01%	14%	42%	90,01%	90,01%	kuning
1b-CP	Indeks integritas	P/L	89,17	92	19%	58%	103,67%	103,67%	hijau
	Customer Perspective (20%)	20%						22,60%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							114,13%	
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/L	71,50%	91,19%	19%	50%	127,53%	120,00%	hijau
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	P/L	86,50%	93,65%	19%	50%	108,27%	108,27%	hijau
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							104,87%	
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100,00%	98,82%	14%	50%	98,82%	98,82%	kuning
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	P/M	100,00%	110,92%	14%	50%	110,92%	110,92%	hijau
4	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien							120,00%	
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	P/M	75	93,23	14%	100%	124,31%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%						29,12%	
5	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif							113,58%	
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	107,15%	14%	50%	107,15%	107,15%	hijau
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100,00%	145,04%	14%	50%	145,04%	120,00%	hijau
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							115,89%	
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	86,00%	75,86%	14%	50%	111,79%	111,79%	hijau
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89,00%	116,92%	14%	50%	131,37%	120,00%	hijau
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							120,00%	
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16,00%	0,00%	14%	100%	200,00%	120,00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%						29,70%	
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							115,77%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	90,00%	126,11%	14%	50%	140,12%	120,00%	hijau
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	85	94,81	14%	50%	111,54%	111,54%	hijau
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00%	
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	120	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
9b-CP	Persentase deviasi data PNPB fungsional DJKN	P/M	10,00%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%	hijau
10	Komunikasi publik yang efektif							120,00%	
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik	P/M	80	100	14%	100%	125,00%	120,00%	hijau
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							119,48%	
11a-N	Indeks efektivitas UKI	P/M	82,00	98	14%	50%	118,95%	118,95%	hijau
11b-N	Tingkat capaian Unit Kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100	120	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								110,79%	hijau

1. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Realisasi yang terdiri dari PNPB BMN, PNPB Piutang Negara, dan PNPB Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun 2024 sebesar **Rp16.446.218.877,00** atau sebesar **90,01%** dari total target sebesar **Rp18.272.044.500,00**. IKU ini belum mencapai target dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1.	PNBP BMN	Rp6.450.000.000,00	Rp7.178.611.051,00	111,30%
2.	PNBP PN	Rp15.044.500,00	Rp36.480.345,00	242,48%
3.	PNBP Lelang	Rp11.807.000.000,00	Rp9.231.127.481,00	78,18 %
	Total	Rp18.272.044.500,00	Rp16.446.218.877,00	90,01 %

KPKNL Purwakarta	SS.1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	153,18%	80,48%	80,33%	80,33%	58,12%	90,01%	90,01%	
Capaian	153,18%	80,48%	80,33%	80,33%	58,12%	90,01%	90,01%	

IKU ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu pada PNBP Lelang. Beberapa yang menyebabkan capaian belum maksimal yaitu banyaknya lelang TAP, banyaknya objek lelang yang kurang marketable dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil.

a. Isu Utama dan Implikasi

Sampai dengan Triwulan IV Capaian Penerimaan PNBP terealisasi sebesar 90,01% atau belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun dengan rincian PNBP BMN 111,30 % dari target tahunan; PNBP Piutang Negara 242,48% dari target tahunan; PNBP Lelang 78,18% dari target tahunan.

b. Akar Masalah

- Terdapat beberapa persetujuan sewa yang belum ditindaklanjuti dan persetujuan penjualan BMN yang belum dilakukan penjualan secara lelang.
- Terdapat beberapa persetujuan sewa yang tidak ditindaklanjuti dan penjualan BMN tidak ada peminat.
- Masih banyaknya lelang TAP yang berasal dari jenis Lelang Eksekusi Hak

Tanggungan dan Lelang Eksekusi Harta Pailit.

- Kemampuan finansial debitur/Penanggung Hutang yang sebagian besar tergolong ekonomi kurang mampu.
- Tidak ada itikad baik dari Debitur untuk menyelesaikan utang.
- Sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang tidak potensial (barang jaminan tidak marketable/bermasalah).

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Pemberitahuan informasi terkait adanya Crash Program dan penggalan potensi dari BKPN yang masuk dalam kriteria *Crash Program* antara lain penyerahan dari LPDB, DJKN Eks BPPN dan pemerintah daerah.
- Melakukan koordinasi dengan satker yang telah terbit persetujuan baik pemanfaatan maupun penjualan agar segera ditindaklanjuti (termasuk aset KOIN MAS DJKN Jabar-Purwakarta).
- Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang baik ke perbankan, Pemda, Satker maupun Pelaku UMKM di wilayah Purwakarta, Subang, dan Karawang, melakukan sosialisasi website portal.lelang.go.id ke pelaku UMKM di wilayah Purwakarta bekerjasama dengan bank-bank dan Bea Cukai Purwakarta, memberikan sosialisasi lelang.
- Menayangkan obyek lelang di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik dan berkelanjutan.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Koordinasi terkait perpanjangan sewa yang habis masa berlakunya tahun 2024 ini dan Melakukan wasdal atas persetujuan pengelolaan yang telah terbit.
- Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang baik ke perbankan, Pemda, Satker maupun Pelaku UMKM di wilayah Purwakarta, Subang, dan Karawang, melakukan informasi melalui medsos terkait obyek yang akan dilelang di KPKNL Purwakarta, melakukan sosialisasi website portal.lelang.go.id ke pelaku UMKM di wilayah Karawang, memberikan sosialisasi PMK 122 Tahun 2023 ke Perbankan.

2. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU Indeks Integritas bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

Target Indeks Integritas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2024 sebesar **89,17**. Dari target tersebut, diperoleh realisasi sebesar **92,44** dengan persentase capaian **103,67%**.

KPKNL Purwakarta	SS.1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	-	-	-	-	-	89,17	89,17	Max/AVG
Realisasi	-	-	-	-	-	92,44	92,44	
Capaian	-	-	-	-	-	100,56%	100,56%	

a. Isu Utama dan Implikasi

Realisasi berasal dari penilaian tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

b. Akar Masalah

Penilaian dilakukan oleh internal dan eksternal berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) sehingga tingkat kendali lemah.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan Sosialisasi terkait pecegahan anti korupsi kepada stakeholder dalam kegiatan sosialisasi SBSK kepada Pengguna Barang, Siman V2 dan Sosialisasi dan Edukasi Lelang dalam rangka HUT Lelang ke-116.
- Integrity Sharing yang diselenggarakan secara online pada tanggal 13 Juni 2024.
- Sosialisasi antikorupsi internal telah dilakukan secara khusus oleh Kepala KPKNL Purwakarta pada tanggal 20 Mei 2024. Setelah upacara peringatan Kebangkitan Nasional ke-116 di halaman KPKNL Purwakarta, dilanjutkan dengan kegiatan secara daring sosialisasi Antikorupsi Internal dalam kegiatan rutin Sapa Pagi Senin.
- Pembuatan video dan sosialisasi terkait integritas melalui medsos (Youtube, IG, FB)
- Menyampaikan data responden ke Sekretariat DJKN.
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti

prosedur/ketentuan yang berlaku.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait dengan Integritas kepada pihak Internal (pegawai, PPNNP, honorer, Satpam) KPKNL Purwakarta.
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait dengan Integritas kepada pihak eksternal pengguna layanan di wilayah kerja KPKNL Purwakarta.
- Menayangkan sosialisasi terkait Integritas di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik.
- Meningkatkan Pengawasan internal yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan pengendalian sebagai tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

3. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk eksisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan. Target jumlah NUP yang menjadi perhitungan di tahun 2024 berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu: (1) Perhitungan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK sebanyak 896 NUP ; (2) Perhitungan optimalisasi BMN dengan SBSK yang telah didata dan dihitung tahun 2023 sebanyak 313 NUP.

Target IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan pada KPKNL Purwakarta tahun 2024 secara keseluruhan ditetapkan sebesar **71,50%**. Dari target tersebut, dapat direalisasikan sebesar **91,19%** atau sebesar **127,53%** dari target, dengan rincian sebagai berikut:

KPKNL Purwakarta	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	30%	50%	50%	60%	60%	71,50%	71,50%	Max/TLK
Realisasi	56,53%	86,69%	86,69%	88,74%	88,74%	91,19%	91,19%	
Capaian	188,43%	173,38%	173,38%	147,9%	147,9%	127,53%	127,53%	

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

a. Isu Utama dan Implikasi

Sampai dengan Q4 2024, capaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 91,19% dari target tahunan sebesar 71,50%.

b. Akar Masalah

Adanya tambahan sebanyak 699 NUP SBSK dari KPKNL Bandung yang merupakan perbantuan untuk dapat dilakukan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Koordinasi awal dengan satuan kerja target
- Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada satuan kerja target tentang pendataan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK
- Melakukan survei lapangan dalam rangka pendataan BMN dalam rangka mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK
- Melakukan survei lapangan dalam rangka pendataan BMN dalam rangka mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK
- Melakukan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan survei lapangan dalam rangka pendataan BMN dalam rangka mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.
- Melakukan perhitungan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK
- Melakukan perhitungan optimalisasi BMN dengan SBSK
- BKO dari KPKNL Bandung dalam proses koordinasi dan perhitungan
- Perbantuan dari luar Seksi PKN

4. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang. Target persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2024 ditetapkan sebesar **86,50%**, dapat direalisasikan sebesar **93,65%** dengan capaian **108,27%**.

KPKNL	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
Purwakarta	2b-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	10%	45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%	Max/TLK
Realisasi	74,07%	80,95%	80,95%	90,48%	90,48%	93,65%	93,65%	
Capaian	740,70%	179,89%	179,89%	150,80%	150,80%	108,27%	108,27%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Persetujuan di Semester II 2023 sejumlah 41 persetujuan, sudah ditindaklanjuti 39 persetujuan.
- Persetujuan di Semester I 2024 sejumlah 22 persetujuan, sudah ditindaklanjuti 18 persetujuan.
- Terdapat Satker yang belum melaksanakan tindak lanjut persetujuan yang telah ditetapkan.

b. Akar Masalah

- Pada periode semester II 2023, terdapat 2 persetujuan sewa tidak ditindaklanjuti dan telah batal demi hukum.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan monitoring terhadap batas waktu persetujuan.
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait tindaklanjut persetujuan yang telah ditetapkan oleh KPKNL Purwakarta.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengirimkan surat pemberitahuan kepada satuan kerja untuk segera menindak lanjuti surat persetujuan pengelolaan BMN yang telah ditetapkan.
- Terhadap persetujuan yang tidak ditindaklanjuti dan telah melewati batas waktu akan dikirimkan surat klarifikasi dan permintaan penertiban kepada satuan kerja terkait.

5. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Target Realisasi Pokok Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2024 secara keseluruhan ditetapkan sebesar **Rp269.407.000.000,00**. Dari target tersebut, dapat direalisasikan sebesar **Rp266.236.504.140,00** atau sebesar **98,82%**, dengan rincian persentase sebagai berikut:

KPKNL	SS.3 Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
Purwakarta	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	91,06%	67,50%	67,50%	96.33%	96.33%	98,82%	98,82%	
Capaian	91,06%	67,50%	67,50%	96.33%	96.33%	98,82%	98,82%	

Uraian IKU Tahun 2024	Target IKU Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian
Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	Rp269.407.000.000,00	Rp266.236.504.140,00	98,82%
Pokok Lelang Kelas I	Rp199.572.000.000,00	Rp169.499.685.140,00	84,93%
Pokok Lelang Pegadaian	Rp69.835.000.000,00	Rp96.736.819.000,00	138,52%

Seperti hal nya PNBP Lelang IKU ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu untuk Pokok Lelang Kelas I. Beberapa yang menyebabkan capaian belum maksimal yaitu banyaknya lelang TAP, banyaknya objek lelang yang kurang marketable ataupun bermasalah, dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil.

a. Isu Utama dan Implikasi

- Capaian pokok lelang di Q4 sebesar Rp266.236.504.140,00 atau 98,82% dari target tahunan sebesar Rp269.407.000.000,00.

b. Akar Masalah

- Banyaknya permohoann lelang Perbankan pada BRI Mikro dengan nilai rupiah kecil dan jumlah frekuensi lelang tinggi. Namun demikian jaminan tidak marketable, karena lokasi jaminan yang tidak strategis.
- Adanya beberapa lelang besar yang batal.
- Masih banyaknya lelang TAP yang berasal dari jenis lelang eksekusi Hak Tanggungan permohonan Perbankan dan dari lelang eksekusi harta pailit.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang ke Kejaksaan, Satker, Perbankan di wilayah Purwakarta, Subang dan Karawang.
- melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang baik ke perbankan, Pemda, Satker maupun Pelaku UMKM di wilayah Purwakarta, Subang, dan karawang, melakukan informasi melalui medsos terkait obyek yang akan dilelang di KPKNL Purwakarta, melakukan sosialisasi website portal.lelang.go.id ke pelaku UMKM di

wilayah Purwakarta bekerjasama dengan BRI dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Purwakarta, memberikan sosialisasi lelang sukarela BUMN Persero ke Pegawai PT Pupuk Kujang.

- Mendorong PT. Waskita Beton Precast Tbk untuk segera mengajukan permohonan lelang sukarela tahap selanjutnya untuk aset berupa kendaraan, alat-alat produksi, serta tanah dan bangunan pabrik.
- Mendorong Seksi Piutang Negara untuk segera melakukan permohonan lelang barang jaminan yang marketable.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang baik ke perbankan, Pemda, Satker maupun Pelaku UMKM di wilayah Purwakarta, Subang, dan Karawang,
- melakukan informasi melalui medsos terkait obyek yang akan dilelang di KPKNL Purwakarta, melakukan sosialisasi website portal.lelang.go.id ke pelaku UMKM di wilayah Karawang, memberikan sosialisasi PMK 122 Tahun 2023 ke Perbankan
- Mendorong pemohon lelang dengan nilai cukup besar supaya melakukan lelang ulang
- Mendorong percepatan Lelang PUPN (Texmaco).
- Menayangkan obyek lelang di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik dan berkelanjutan.

6. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Target penurunan outstanding piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun 2024 sebesar **100%** dari **Rp200.000.000,00** dan terdapat addendum pada triwulan III menjadi **Rp878.500.000,00**. Dari target tersebut dapat direalisasikan penurunan outstanding piutang Negara sebesar **Rp975.006.548,00** dengan persentase nilai realisasi **110,92%**.

KPKNL	SS.3 Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
Purwakarta	3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	5%	35%	35%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	1749,30%	608,39%	608,39%	101,03%	101,03%	110,92%	110,92%	
Capaian	1749,30%	608,39%	608,39%	101,03%	101,03%	110,92%	110,92%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Capaian realisasi penurunan outstanding dengan realisasi sebesar Rp. 887.574.848,00 dari target Q3 sebesar Rp. 878.500.000,00.
- Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024, maka Crash Program Keringanan Utang sebagai salah satu bentuk optimalisasi pengurusan piutang negara.

b. Akar Masalah

Target telah terlampaui sehingga dilakukan addendum pada Q3 dan Q4

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Pemberitahuan informasi terkait adanya Crash Program dan penggalan potensi dari BKPN yang masuk dalam kriteria *Crash Program* antara lain penyerahan dari LPDB, DJKN Eks BPPN dan pemerintah daerah.
- Melaksanakan verifikasi dan updating data di aplikasi focuspn.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Meningkatkan tahap pengurusan piutang negara.
- Melakukan persuasif kepada debitur agar mengikuti Crash Program Keringanan Utang.
- Berkoordinasi secara aktif dengan debitur maupun kreditur.

7. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Target rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2024 sebesar **75**. Dari target tersebut, dapat terealisasi sebesar **93,23** atau dengan persentase capaian sebesar **124,31%** dibandingkan target.

KPKNL Purwakarta	SS.4 Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	4a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/AVG
Realisasi	92,50	95,15	95,15	95,34	95,34	93,23	93,23	
Capaian	123,33%	126,87%	126,87%	127,12%	127,12%	124,31%	124,31%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan Triwulan IV 2024, realisasi Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian sebesar 93,23 dengan persentase capaian sebesar 124,31% dibanding target.

b. Akar Masalah

- Potensi masalah akan terjadi dalam hal terdapat permohonan penilaian yang banyak menumpuk pada waktu bersamaan.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Menghindari penilaian dilakukan secara TIM dengan anggota TIM seluruhnya JFPP.
- Mengutamakan penugasan JFPP secara perorangan sehingga berkas permohonan dapat dibagi 3 dan penjadwalan penilaian menjadi lebih cepat.
- Dalam hal terdapat permohonan penilaian yang mengharuskan dilaksanakan secara TIM, anggotaTim melibatkan penilai/pegawai diluar JFPP.
- Meminta bantuan tenaga penilai dari Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Menghindari penilaian dilakukan secara TIM dengan anggota TIM seluruhnya JFPP.
- Mengutamakan penugasan JFPP secara perorangan sehingga berkas permohonan dapat dibagi 3 dan penjadwalan penilaian menjadi lebih cepat.
- Dalam hal terdapat permohonan penilaian yang mengharuskan dilaksanakan secara TIM, anggotaTim melibatkan penilai/pegawai diluar JFPP.
- Meminta bantuan tenaga penilai dari Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN.

8. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Target persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2024 sebesar **100%** dengan (sebanyak **713** bidang tanah yang diselesaikan). Dari target tersebut, dapat direalisasikan mencapai **107,15%** dari target atau sebanyak **764** bidang tanah yang telah diselesaikan.

KPKNL Purwakarta	SS.5 Pengelolaan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	16,83%	16,83%	126,69%	126,69%	107,15%	107,15%	
Capaian	-	16,83%	16,83%	126,69%	126,69%	107,15%	107,15%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan Q4 2024, capaian persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan sebesar 107,15%.

b. Akar Masalah

- Adanya surat dari Sesditjen KA bahwa wilayah Purwakarta, Subang, dan Karawang tidak menjadi target pensertipikatan di wilayah Jawa Barat. Dimana satker DJKA merupakan target K1 pensertipikatan sejumlah 549 bidang (174 NUP), dengan target seluruhnya 713 bidang. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap capaian sertipikasi KPKNL Purwakarta.
- Data objek sertipikasi tidak didukung dokumen yuridis (Dokumen Perolehan).
- Satuan kerja tidak mengetahui letak objek sertipikasi dan batas-batas wilayah.
- Data aset SIMAN tidak valid.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Sosialisasi sertipikasi 2024 telah dilaksanakan guna mendorong satker untuk menyiapkan dokumen pensertipikatan BMN berupa tanah serta koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat.
- Koordinasi dengan kantah di wilayah kerja KPKNL Purwakarta dalam hal koordinasi satuan kerja pemilik tanah dan memantau perkembangan hasil capaian.
- Objek pensertipikatan pada Satker DJKA sebanyak 549 bidang, menunggu hasil review Itjen, KPKNL berkoordinasi terkait delinasi pada wilayah kerja KPKNL Purwakarta.
- Usulan revisi penetapan lokasi untuk mengganti beberapa NUP yang tidak bisa dilakukan pensertipikatan.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Monitoring dan koordinasi dengan satuan kerja terkait pensertipikatan agar sesuai target.
- Mendorong KPKNL pemilik SO untuk mendorong satkernya segera melengkapi dan koordinasi dengan kantah di wilayah KPKNL Purwakarta.
- Terkait DJKA langkah yang akan diambil menunggu hasil rekomendasi Itjen.
- Bersurat Kembali ke DJKA.

9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Target persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2024 terdiri dari target **92 NUP** BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dievaluasi kinerja dan disampaikan rekomendasi kepada satker dan target **5 paket rekomendasi** BMN tanah dan/atau bangunan yang rekomendasinya ditindaklanjuti oleh satker. Dalam perhitungan capaiannya, BMN yang dievaluasi kinerja memiliki bobot 80% dan paket rekomendasi BMN yang ditindaklanjuti memiliki bobot 20%.

Dari target tersebut, dapat direalisasikan capaian IKU dengan perhitungan persentase capaian sebesar **145,04%** yang dirinci, sebagai berikut:

- sebanyak **107 NUP** BMN tanah dan/atau bangunan yang telah dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasi kepada satker (target **92 NUP**);
- sebanyak **13 paket rekomendasi** BMN tanah dan/atau bangunan yang rekomendasinya ditindaklanjuti oleh satker (target **5 rekomendasi**).

KPKNL Purwakarta	SS.5 Pengelolaan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	17,91%	37,22%	37,22%	151,96%	151,96%	145,04%	145,04%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	151,96%	151,96%	145,04%	145,04%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Evaluasi kinerja BMN tahun 2024 telah dilaksanakan.
- Sampai dengan periode Q4 2024 telah dilakukan evaluasi kinerja BMN terhadap 107 NUP dan telah disampaikan rekomendasi sebanyak 13 paket, hal ini telah melampaui target evaluasi kinerja BMN periode 92 NUP evaluasi kinerja dan 5 paket rekomendasi.

b. Akar Masalah

- Kegiatan evaluasi kinerja BMN tahun 2024 masih dalam proses verifikasi data dan menunggu data sekunder dari BPS.
- Masih terdapat rekomendasi evaluasi kinerja BMN tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti oleh satuan kerja.
- Terdapat perbedaan pemahaman terkait perhitungan capaian berdasarkan paket.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Membentuk Tim Evaluasi Kinerja BMN tahun 2024.
- Mengirimkan surat permintaan data kepada BPS Kabupaten Purwakarta, Subang dan Karawang.
- Telah melakukan peninjauan fisik dan melakukan evaluasi kinerja BMN pada Satker target.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja target evaluasi kinerja BMN tahun 2024 dan satuan kerja target tindak lanjut rekomendasi tahun 2023.
- Melakukan survey lapangan kegiatan evaluasi kinerja BMN tahun 2024.
- Melakukan perhitungan evaluasi kinerja BMN tahun 2024.

10. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa:

- 1) BKPN Lunas (SPPNL);
- 2) BKPN Penarikan (SPPNS);
- 3) BKPN Dikembalikan (SKPPN);
- 4) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);

- 5) Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 6) BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
- 7) BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;

dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Target persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2024 adalah sebesar **86%** dari total saldo BKPN sebanyak **29 BKPN** atau ditargetkan menurunkan saldo menjadi **25 BKPN**.

Sampai dengan Q4 2024, sebanyak **7 BKPN** yang telah dinyatakan selesai. Sehingga saldo BKPN berkurang menjadi **22 BKPN** atau dipersentasekan sebesar **75,86%** dari saldo awal sebanyak **29 BKPN**. Realisasi IKU diperhitungkan memformulasikan perbandingan antara realisasi saldo BKPN sebesar 75,86% (22 BKPN) dibandingkan target saldo BKPN sebesar 86% (25 BKPN) dan menghasilkan capaian sebesar **111,79%**.

KPKNL	SS.6 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
Purwakarta	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	100%	97%	97%	90%	90%	86%	86%	Min/TLK
Realisasi	96,55%	93,10%	93,10%	89,66%	89,66%	75,86%	75,86%	
Capaian	103,45%	104,02%	104,02%	100,38%	100,38%	100%	111,79%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan Q4 2024, sebanyak **7 BKPN** yang telah dinyatakan selesai. Sehingga saldo BKPN berkurang menjadi **22 BKPN** atau dipersentasekan sebesar **75,86%** dari saldo awal sebanyak **29 BKPN**. Realisasi IKU diperhitungkan mendapatkan capaian sebesar **111,79%**
- Capaian IKU ini dapat direalisasikan dengan pengurusan penyelesaian piutang negara melalui pelunasan oleh debitur.
- Berupaya melaksanakan percepatan penyelesaian piutang negara dengan adanya crash program keringanan utang

b. Akar Masalah

- Tingkat kemampuan Debitur untuk penyelesaian utang sangat rendah;
- Tidak ada itikad baik dari Debitur untuk menyelesaikan utang;
- Sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang tidak potensial (tidak memiliki barang jaminan dan/atau barang jaminan tidak marketable/bermasalah).

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaksanakan penagihan langsung.
- Melaksanakan penagihan dan pemberitahuan Crash Program kepada Debitur.
- Melaksanakan peningkatan tahap pengurusan piutang negara.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melaksanakan penagihan langsung.
- Secara intensif melaksanakan penagihan dan pemberitahuan Crash Program kepada Debitur.
- Melaksanakan peningkatan tahap pengurusan piutang negara

11. Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa tinggi intensitas frekuensi lelang yang laku terjual. Target persentase produktivitas lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2024 sebesar **89%**. Dari target tersebut, diperoleh realisasi sebesar **116,92%** dengan persentase capaian sebesar **131,37%** atau capaian maksimal **120%**.

KPKNL Purwakarta	SS.6 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	6b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	Max/TLK
Realisasi	58,34%	62,11%	62,11%	93,42%	93,42%	116,92%	116,92%	
Capaian	194,46%	138,02%	138,02%	155,7%	155,7%	131,37%	131,37%	

a. Isu Utama dan Implikasi

Sampai dengan Triwulan IV 2024, Capaian Produktivitas Lelang terealisasi sebesar 116,92% yang dirinci berasal dari: lelang sukarela 35%, lelang non eksekusi wajib 63%; lelang eksekusi Hak Tanggungan 6%; lelang eksekusi diluar Hak Tanggungan 22%.

b. Akar Masalah

Masih banyaknya lelang TAP yang berasal dari jenis lelang eksekusi Hak Tanggungan permohonan Perbankan dan dari lelang eksekusi pailit.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang ke Kejaksaan, Satker, Perbankan, di wilayah Purwakarta, Subang dan Karawang dan ke Rumah BUMN dan pelaku UMKM Purwakarta.
- Menayangkan obyek lelang di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik
- Koordinasi dan penggalan potensi lelang ke perbankan, Balai Lelang, pengadilan, satker, dan pelaku UMKM di wilayah Purwakarta, Karawang dan Subang
- Sosialisasi pemanfaatan aplikasi portal.lelang.go.id kepada masyarakat.
- Memprioritaskan pelaksanaan lelang untuk objek lelang yang potensial laku
- Koordinasi dengan pemohon lelang terutama yang potensial AYDA.
- Melakukan sosialisasi terkait website lelang.go.id ke para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Subang

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang baik ke perbankan, Pemda, Satker maupun Pelaku UMKM di wilayah Purwakarta, Subang, dan karawang.
- Melakukan informasi melalui medsos terkait obyek yang akan dilelang di KPKNL Purwakarta.
- Melakukan sosialisasi website portal.lelang.go.id ke pelaku UMKM di wilayah Karawang.
- Memberikan sosialisasi PMK 122 Tahun 2023 ke Perbankan.

12. Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Deviasi ketergantungan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Target deviasi ketergantungan nilai penilaian pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2024 sebesar **16%**. Dari target tersebut,

diperoleh capaian deviasi ketergantungan hasil penilaian sebesar **0%** dengan perhitungan persentase capaian IKU sebesar **200%** atau dengan capaian maksimal **120%**.

KPKNL	SS.7 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
Purwakarta	7a-CP Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	

a. Isu Utama dan Implikasi

Seluruh hasil penilaian digunakan oleh pengelola Barang baik untuk Pemanfaatan BMN maupun Pemindahtanganan BMN sehingga dari target deviasi ketergunaan Hasil Penilaian sebesar 16% (polarisasi Minimize), **tidak terdapat** deviasi ketergunaan hasil penilaian selama Triwulan I s.d. Triwulan IV 2024.

b. Akar Masalah

Satuan Kerja/Pemohon persetujuan pengelolaan BMN dalam mengusulkan usulan nilai limit atau nilai sewa kurang didukung perhitungan yang memadai.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Optimalisasi kegiatan pemaparan konsep laporan penilaian tidak saja secara luring tapi juga daring melalui Microsoft Teams.
- Memperhatikan nilai limit/harga sewa yang diajukan oleh pemohon sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan nilai dengan tetap berpegang teguh pada prinsip prinsip penilaian dan iindependensi penilai.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melaksanakan kegiatan pemaparan konsep laporan penilaian tidak saja secara luring tapi juga daring melalui Microsoft Teams.
- Memperhatikan nilai limit/harga sewa yang diajukan oleh pemohon sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan nilai dengan tetap berpegang teguh pada prinsip prinsip penilaian dan iindependensi penilai

13. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Kegiatan pelatihan dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai. Pengajuan diklat pegawai disesuaikan dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*.

Target persentase pengembangan kompetensi pegawai untuk mengukur persentase banyaknya pegawai di KPKNL Purwakarta yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Target persentase pengembangan kompetensi pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2024 ditetapkan sebesar **90%** dan dapat direalisasikan sebesar **113,50%** atau sebesar **126,11%** dari target.

KPKNL	SS.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
Purwakarta	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	45%	60%	60%	80%	80%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	73%	93%	93%	109,33%	120%	113,50%	113,50%	
Capaian	162,22%	155%	155%	136,66%	120%	126,11%	126,11%	

a. Isu Utama dan Implikasi

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, jumlah bawahan seluruhnya 30 pegawai, jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria kompetensi pegawai sejumlah 30 pegawai. Dan jumlah bawahan yang memenuhi kriteria sejumlah 30 pegawai. Semua pegawai dihimbau untuk mengikuti diklat sesuai competency yang diperlukan pada seksinya baik melalui e-learning maupun Pelatihan jarak jauh.

b. Akar Masalah

- Mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan.
- Pengembangan Kompetensi Mandatory cukup dominan.
- Realisasi Pengembangan Kompetensi di luar rencana cukup banyak.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi secara berkala.
- Penyusunan rencana melalui IDP.
- Mencatat tambahan rencana karena ada pengembangan kompetensi Mandatory.
- Mencatat seluruh realisasi pengembangan kompetensi, yang direncanakan dan yang diluar rencana.
- Melaporkan ke Kanwil sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Terus mencatat tambahan atas rencana pengembangan kompetensi karena ada intervensi pengembangan kompetensi Mandatory.
- Terus mencatat realisasi pengembangan kompetensi di luar rencana, sebagai bahan perbaikan rencana dikemudian hari.

14. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi sebagai berikut: 1. Indeks Pengelolaan Kinerja Organisasi (bobot 30%); Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai (bobot 30%); 2. Indeks Kualitas Manajemen Risiko (bobot 40%).

Target Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2024, yaitu **85**. Dari target tersebut dapat terealisasi sebesar **94,81** atau dengan persentase capaian sebesar **111,54%** dari target.

KPKNL	SS.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
Purwakarta	8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/TLK
Realisasi	98	94	94	96	96	94,81	94,81	
Capaian	115,83	110,34	110,34	112,69	112,69	111,54	111,54	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Peraturan terkait Manajemen Kinerja dan Risiko yaitu KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelola Keuangan Negara, sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman dan Kerjasama terkait manajemen kinerja dan risiko pada semua pegawai khususnya seksi KI dan subbag Umum.
- Realisasi diperoleh dari penilaian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Kinerja Pegawai dan revidi risiko oleh Kanwil DJKN .
- Realisasi diperoleh dari Penilaian Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Kinerja Pegawai
- Realisasi berasal dari hasil penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi sebagai berikut: 1. Indeks Pengelolaan Kinerja Organisasi (bobot 30%); Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai (bobot 30%); 2. Indeks Kualitas Manajemen Risiko (bobot 40%).

b. Akar Masalah

- Perlunya ditingkatkan kualitas pengelolaan manajemen kinerja dan risiko pada KPKNL.
- Perlu adanya sinergi antara Seksi Kepatuhan Internal dan Subbagian Umum.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).
- Penyusunan Sarsaran Kinerja Pegawai (SKP).
- Penyusunan Piagam Manajen Risiko (PMR).
- Menyusun dan melaporkan laporan terkait pengelolaan kinerja dan pengelolaan pegawai sesuai dengan norma waktu yang diteapkanMelaksanakan seluruh

tahapan pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai serta melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan manajemen risiko.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan sosialisasi Internal terkait pengelolaan Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Kinerja Pegawai.
- Melaksanakan sosialisasi internal terkait manajemen risiko.
- Melaksanakan rapat internal rutin terkait manajemen kinerja organisasi dan pegawai.
- Melaksanakan rapat internal rutin terkait manajemen risiko.
- Melaksanakan reviu kinerja organisasi dan pegawai.
- Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai serta melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan manajemen risiko.

15. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2024 ditetapkan sebesar **100** dan dapat direalisasikan dengan capaian maksimal sebesar **120%** dari target.

KPKNL	SS.9 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
Purwakarta	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	103	103	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	103%	103%	120%	120%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara Rencana Penarikan Dana dengan Realisasi Anggaran dalam pelaksanaan Belanja Barang maupun Belanja Modal.
- Adanya kemungkinan penghematan ataupun revisi pengurangan anggaran.
- Adanya kemungkinan penambahan DIPA topdown kegiatan BLBI dan Sertipikasi.
- Terdapat perubahan formulasi pada IKPA, khususnya pada indikator RPD dan Penyerapan Anggaran.

b. Akar Masalah

- Adanya perubahan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Kebijakan Pemerintah yang mungkin akan diterapkan, misalnya sehubungan dengan proses Pemilu dan Pilkada serta peralihan pasca Pemilu dan Pilkada.
- Penambahan DIPA topdown yang akan berpengaruh terhadap rencana kegiatan dan RPD.
- Cukup tingginya target realisasi anggaran yang ditetapkan Ditjen Perbendaharaan di Triwulan II 2024.
- Komunikasi dengan pihak ketiga, seperti vendor pelaksana pekerjaan.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan pengawasan berjenjang terhadap kegiatan.
- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, output dan RPD secara rutin dan berkala setiap bulan.
- Meningkatkan koordinasi dengan seksi teknis dan pihak-pihak yang terlibat.
- Melakukan penyesuaian anggaran dan RPD tiap awal triwulan dan revisi tingkat Kanwil DJPB atau DJA (apabila diperlukan)

d. Rekomendasi Rencana Aksi

Melanjutkan tindakan yang telah dilaksanakan, diantaranya: melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, output dan RPD secara rutin dan berkala setiap bulan dan/atau melakukan penyesuaian anggaran dan RPD tiap awal triwulan dan revisi tingkat Kanwil DJPB atau DJA (apabila diperlukan).

16. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bea Lelang dengan Akun 425782 (Pejabat Lelang Kelas I) dan 425783 (Pejabat Lelang Kelas II), serta Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) dengan Akun 425785.

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN pada KPKNL merupakan:

- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%. Target IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2024 adalah sebesar **10%**. Dari target tersebut, dapat direalisasikan dengan tidak adanya selisih/deviasi sehingga diperoleh capaian deviasi data PNBPN fungsional DJKN sebesar **0%** dengan persentase capaian maksimal **120%**.

KPKNL	SS.9 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
Purwakarta	9b-CP Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

a. Isu Utama dan Implikasi

Pada IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, tidak terdapat selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 (Pendapatan PL I) pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN dan Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 (Biad) pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN.

b. Akar Masalah

Selisih biasanya disebabkan karena kesalahan penginputan NTPN, adanya perbedaan tanggal buku antara aplikasi Simponi dan aplikasi OMSPAN, ataupun penginputan data pembayaran pada aplikasi focusPN tidak disertai dengan NTPN.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan konfirmasi antara penginput dropbox dan data pada penyetoran bendahara terkait perbedaan tanggal buku.
- Melakukan konfirmasi dan pengecekan dengan PIC dropbox atas data yang diinput dan membandingkan dengan data pada OMSPAN.
- Melakukan pengecekan data dropbox oleh kanwil untuk kesalahan input NTPN atau kekurangan input.
- Input data NTPN bersamaan dengan menginput data pembayaran setelah dilakukan pemindahbukuan biad ke kas negara.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan penarikan data PNBPN dari aplikasi OMSPAN untuk konfirmasi ke penginput dropbox.
- Input data pembayaran bersamaan dengan input NTPN pada aplikasi FocusPN.

17. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan.

Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi

Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
- 2) Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik;
- 3) Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website.

Target IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2024 adalah sebesar **indeks 80** dan dapat direalisasikan sebesar **indeks 100** atau dipersentasekan sebesar **125%** dari target (persentase capaian maksimal 120%).

KPKNL	SS.10 Komunikasi Publik yang Efektif							
Purwakarta	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	107,83	100	100	100	100	100	100	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Capaian Indeks pengelolaan layanan Informasi Publik (PPID) sebesar 100%.
- IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:
 - Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
 - Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik;
 - Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website.

b. Akar Masalah

- Mewujudkan pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) yang andal.
- Penyediaan dan pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website yaitu berupa Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Daftar Informasi Publik yang Wajib diumumkan secara Serta Merta, Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website yaitu berupa Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Daftar Informasi Publik yang Wajib diumumkan secara Serta Merta, Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Secara konsisten melakukan penyediaan dan pemutakhiran layanan informasi publik pada Website.
- Menyampaikan Informasi Publik atas masuknya permintaan Informasi Publik dari Pengguna Layanan.

18. Indeks Efektivitas UKI

Untuk memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan kegiatan penilaian efektivitas UKI yang memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

- 1) Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
- 2) Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
- 3) Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
- 4) Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
- 5) Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
- 6) Penyusunan Profil Pegawai,
- 7) Penyusunan Simpulan dan LPPI,
- 8) Jumlah Pengaduan Masyarakat,
- 9) Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI,
- 10) Kepuasan Stakeholders, dan
- 11) Hasil Survei Penilaian Integritas.

Perhitungan realisasi capaian IKU diperoleh melalui hasil penilaian pada Kertas Kerja Penilaian Efektivitas UKI. Target Indeks Efektivitas UKI di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebesar **82**. Dari target tersebut dapat terealisasi sebesar **98** atau dengan persentase capaian sebesar **118,95%** dari target.

KPKNL	SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
Purwakarta	11a-N Indeks Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	5	15	15	20	20	82	82	Max/TLK
Realisasi	5	15	15	20	20	98	98	
Capaian	100	100	100	100	100	118,95	118,95	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Peraturan terkait Manajemen Kinerja dan Risiko yaitu KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelola Keuangan Negara, sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman dan Kerjasama terkait manajemen kinerja dan risiko pada semua pegawai khususnya seksi KI dan subbag Umum.
- Realisasi diperoleh dari penilaian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Kinerja Pegawai dan revidi risiko oleh Kanwil DJKN .
- Realisasi diperoleh dari Penilaian Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Kinerja Pegawai
- Realisasi berasal dari hasil penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi sebagai berikut: 1. Indeks Pengelolaan Kinerja Organisasi (bobot 30%); Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai (bobot 30%); 2. Indeks Kualitas Manajemen Risiko (bobot 40%).

b. Akar Masalah

- Antisipasi ketidakpuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan.
- Tingkat ambang batas atau taraf kepuasan pengguna layanan semakin tinggi.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah dilaksanakan Profiling pegawai.
- Telah dilaksanakan EPITE.
- Telah dilaksanakan PPKEKP.
- Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Stakeholder melalui Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
- Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan, Whistleblowing System, dan Penanganan Benturan Kepentingan.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monev atas survey Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi.

19. Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
- 2) Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
- 3) Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Perhitungan realisasi capaian merupakan total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian berdasarkan kombinasi antara:

- 1) Nilai rata-rata penjumlahan komponen "Pemenuhan" dan "Reform" dibagi dengan 42,75* - (bobot 60%);
- 2) Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (18,25) - (bobot 25%);
- 3) Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" dibagi dengan nilai standar lolos ZI-WBK (14,00) - (bobot 15%)

*) Nilai 42,75 diperoleh dari nilai batas minimal dari komponen pengungkit dan hasil untuk menuju WBK (75) dikurangi komponen nilai minimal "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" (18,25) dan "Pelayanan publik yang prima" (14,00).

Target IKU Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebesar **100**. Dari target tersebut dapat terealisasi sebesar **120** atau dengan persentase capaian sebesar **120%** dari target.

KPKNL	SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
Purwakarta	11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	120	120	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Menjaga keberlangsungan dan mempertahankan ZI WBK yang telah diperoleh tahun 2022.
- Capaian realisasi Q4 sebesar 120.

a. Akar Masalah

Perlunya menjaga kompetensi, inovasi, serta mewujudkan kedeltaan dalam inovasi-inovasi yang telah ada.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan

- KPKNL Purwakarta telah menjawab pertanyaan dan mengupload seluruh bukti dokumen pada Aplikasi DIA dan telah dilakukan submit, pada tanggal 28 Maret 2024, lebih cepat dari target submit 31 Maret 2024, dengan harapan Tim dari Kantor Pusat DJKN dapat segera melakukan koreksi apabila ada kekurangan dapat segera ditindaklanjuti.
- Field Evaluation oleh Tim dari Kantor Pusat DJKN pada tanggal 05 Juni 2024.
- Melengkapi kekurangan data berdasarkan pemeriksaan dari Tim Kantor Pusat DJKN, KPKNL Purwakarta.

e. Rekomendasi Rencana Aksi

Memonitoring atas tindak lanjut dalam pengisian kekurangan data berdasarkan pemeriksaan dari Tim Kantor Pusat DJKN, KPKNL Purwakarta.

- **CAPAIAN KINERJA DALAM KURUN WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR**

Perbandingan capaian kinerja pada KPKNL Purwakarta Tahun 2024 dengan capaian kinerja sebelumnya tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020 sebagai berikut:

PNBP Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	PNBP Aset	2020	5.336.100.000	3.717.185.735	70%
2.	PNBP Aset	2021	6.006.000.000	6.259.167.351	104,21%
3.	PNBP Aset	2022	6.300.000.000	7.198.866.440	114,27%
4.	PNBP Aset	2023	6.400.000.000	9.239.221.640	144,36%
5.	PNBP Aset	2024	6.450.000.000	7.178.611.051	111,30%

PNBP Bea Lelang

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Bea Lelang	2020	8.827.000.000	7.816.527.453	89%
2.	Bea Lelang	2021	11.635.000.000	10.749.304.107	92,38%
3.	Bea Lelang	2022	18.305.000.000	20.393.163.290	111,41%
4.	Bea Lelang	2023	11.807.000.000	8.230.497.307	69,71%
5.	Bea Lelang	2024	11.807.000.000	9.231.127.481	78,18%

Pokok Lelang

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Pokok Lelang	2020	242.577.000.000	211.826.973.319	87%
2.	Pokok Lelang	2021	249.000.000.000	304.344.064.566	122,23%
3.	Pokok Lelang	2022	402.500.000.000	453.432.212.088	112,65%
4.	Pokok Lelang	2023	269.407.000.000	243.674.725.055	90,45%
5.	Pokok Lelang	2024	269.407.000.000	266.236.504.140	98,82%

PNBP Pengurusan Piutang Negara

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BIAD PPN	2020	38.000.000	102.359.724	249%
2.	BIAD PPN	2021	38.000.000	7.590.195	19,97%
3.	BIAD PPN	2022	13.450.000	13.054.697	97,06%
4.	BIAD PPN	2023	2.500.000	4.113.392	164,54%
5.	BIAD PPN	2024	15.044.500	36.480.345	242,48%

Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS)

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Penyelesaian Outstanding tahun 2016 ke Bawah	2020	148.735.388	150.116.245	101%
2.	Penyelesaian Outstanding tahun 2017 ke Bawah	2021	884.628.832	1.130.552.249	127,8%
3.	Penyelesaian Outstanding	2022	301.700.000	709.839.418	235.28%
4.	Penurunan Outstanding	2023	1.060.000.000	1.253.678.702	118,27%
5.	Penurunan Outstanding	2024	878.500.000	975.006.548	110,9%

BKPN Yang Dapat Diselesaikan

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BKPN Selesai	2020	15	22	147%
2.	BKPN Selesai	2021	30	31	103,33%
3.	BKPN Selesai	2022	30	30	100%
4.	BKPN Selesai	2023	9	9	100%
5.	Persentase Saldo BKPN	2024	86%	75,86%	111,79%

• RENCANA KERJA DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024 PADA KPKNL PURWAKARTA

Rencana Kerja

RINCIAN OUTPUT	PIC	Pagu	Target Output
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	PKN	1.922.000	30
Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	PN & Lelang	1.920.000	15
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	PKN & Penilaian	47.320.000	35
Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	PN	16.280.000	20
Risalah Lelang	Lelang	25.122.000	700
Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	Lelang	40.000.000	20
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	PKN	24.765.000	92
Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	PKN	40.800.000	986

Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	PKN	10.560.000	1
Rekomendasi Hasil Penilaian	Penilaian	18.340.000	1
Penggalian Potensi Lelang	Lelang	60.000.000	2
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	PKN	45.762.000	302
Aset BUN yang Dikelola	PKN	114.742.000	129
Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	PKN	43.768.000	9
Layanan Bantuan Hukum	HI	33.960.000	25
Kerumahtanggaan	Umum	96.722.000	12
Layanan Perkantoran	Umum	1.758.295.000	12
Peralatan Fasilitas Perkantoran	Umum	256.736.000	104
Gedung/Bangunan	Umum	164.084.000	80
Kendaraan Bermotor	Umum	375.280.000	3
Kehumasan	HI	16.800.000	20
Pembinaan/Edukasi Publik	HI	11.800.000	20
Rekomendasi Kepatuhan Internal	KI	16.360.000	5
Total		3,233,771,000	

Penggunaan Sumber Daya

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya pada KPKNL Purwakarta dalam rangka pembinaan di kepegawaian, berdasarkan data dan usulan ke Kantor Pusat per 31 Desember 2024, disampaikan sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai ASN : 31 orang
- b. Kenaikan pangkat : 2 orang
- c. Kenaikan Gaji Berkala : 20 orang
- d. Ijin belajar : 3 orang
- e. Pegawai pensiun : 0 orang
- f. Pegawai mengikuti diklat : 31 orang

Dalam hal anggaran, pada Tahun Anggaran 2024 KPKNL Purwakarta mendapat alokasi anggaran awal sebesar **Rp3,233,771,000** (tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh satu ribu rupiah) dan terdapat revisi penghematan belanja perjalanan dinas sesuai arahan dari Kantor Pusat sesuai nota dinas nomor ND-15/KN/KN.1/2024 tanggal 12 November 2024 menjadi sebesar **R3,215,071,000** (tiga miliar dua ratus lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah). Dari total pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2024 tersebut, telah direalisasikan sebesar **Rp3,037,158,607** atau 94,47%. Dalam hal ini telah dilakukan efisiensi sebesar **Rp177,912,393** atau 5,53% dengan realisasi capaian output memenuhi target yang telah ditetapkan dengan rincian, sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	DIPA	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0%
2	Belanja Barang	Rp2,444,216,000	Rp2,271,534,597	92,94%
3	Belanja Modal	Rp770,855,000	Rp765,624,010	99,32%
	Total	Rp3,215,071,000	Rp3,037,158,607	94,47%

Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Purwakarta, sebagai berikut:

	Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A)	Nilai IKPA (Bobot 50%)			97.58
	1. Revisi DIPA	100.00	10	10.00
	2. Deviasi Hal III DIPA	93.87	15	14.08
	3. Penyerapan Anggaran	95.06	20	19.01
	4. Belanja Kontraktual	100.00	10	10.00
	5. Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00
	6. Pengelolaan UP dan TUP	99.97	10	10.00
	7. Dispensasi SPM	0	0	0
	8. Capaian Output	97.96	25	24.49
B)	Nilai SMART (Bobot 50%)			97.81
	1. Capaian Rincian Output	97.08	75.00%	72,81
	2. Penggunaan SBK	100.00	10.00%	10.00
	3. Efisiensi SBK	100.00	15.00%	15.00
Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan IV				97.70
Realisasi IKU IKKPA Triwulan IV				120.00

B. KINERJA LAINNYA

1. INOVASI

1) Inovasi SOP Percepatan Layanan Persetujuan Sewa BMN Berupa ATM dan Kantin

Merupakan inovasi yang mengedepankan percepatan pemberian layanan pemrosesan persetujuan sewa Barang Milik Negara dengan rencana pemanfaatan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Kantin. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 69/KN/2023 Tentang Integrasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, jangka waktu penyelesaian persetujuan/penolakan sewa BMN

berupa tanah dan/atau bangunan dengan jumlah objek BMN yang diajukan sebanyak 1 s.d. 5 objek adalah paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja. Melalui inovasi ini, sesuai Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta Nomor 54/KNL.0804/2024 Tentang Penetapan Inovasi Standar Operasional Prosedur (Standard Operational Procedure) Percepatan Layanan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta, jangka waktu penyelesaian persetujuan/penolakan sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan atas 1 objek BMN dengan rencana pemanfaatan sebagai ATM dan kantin adalah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja.

Latar Belakang:

Kebutuhan pengguna jasa untuk mendapatkan layanan KPKNL yang lebih cepat khususnya berupa pemrosesan persetujuan sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan rencana pemanfaatan sebagai ATM dan kantin.

Tujuan:

Penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan kualitas layanan KPKNL Purwakarta melalui SOP percepatan pemrosesan persetujuan sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan rencana pemanfaatan sebagai ATM dan kantin.

Jenis Inovasi:

SOP percepatan pemrosesan persetujuan sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan rencana pemanfaatan sebagai ATM dan kantin.

2) Cluster Pusaka

Merupakan laman web sederhana berbasis google site yang menyediakan informasi layanan KPKNL Purwakarta, pengajuan layanan pengelolaan BMN secara online, dan Tracking Progres permohonan layanan BMN yang dapat diakses oleh pengguna jasa melalui tautan: s.id/kpknlpwk.

Latar Belakang:

Kebutuhan pengguna jasa untuk mendapatkan informasi layanan KPKNL yang lebih jelas dan mudah diakses oleh pengguna jasa khususnya mengenai jenis dan persyaratan dokumen, pengajuan permohonan layanan dan progres penanganan layanan.

Tujuan:

Meningkatkan kepuasan pengguna jasa dengan menyediakan alat bantu yang dapat memudahkan para pengguna jasa untuk mengakses informasi terkait layanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta.

Jenis Inovasi:

Aplikasi berbasis Google Site yang dapat diakses oleh pengguna jasa secara online.

3) Podcast_Kanal On Air (Podcast Informatif Seputar Kekayaan Negara dan Lelang via YouTube)

Merupakan sarana penyampaian informasi kepada publik dengan media kekinian, santai namun tetap informatif dan akuntabel.

Latar Belakang:

Penyampaian informasi tugas dan fungsi pokok KPKNL Purwakarta di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pelayanan Lelang kepada masyarakat sangat diperlukan sebagai bagian dari fungsi layanan dan keterbukaan informasi dengan model penyampaian yang dinilai mampu menjangkau pengguna layanan dan umumnya masyarakat secara lebih luas dengan media online yang populer.

Tujuan:

Memberikan informasi tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta sebagai instansi vertikal DJKN dengan kemasan kekinian, informatif dan akuntabel.

Jenis Inovasi:

Podcast Kanal On Air dan video kegiatan.

4) Talk To Me

Sarana Pengaduan berbasis elektronik melalui scan barcode oleh pengguna layanan melalui perangkat *Smartphone*.

Latar Belakang:

Adanya kebutuhan untuk mengakomodir pengaduan/saran dari pengguna layanan secara cepat dan *online*.

Tujuan:

Sarana evaluasi dalam upaya meningkatkan perbaikan pelayanan KPKNL Purwakarta kepada pengguna layanan.

Jenis Inovasi:

Sarana pengaduan berbasis elektronik melalui scan barcode yang ditindaklanjuti dengan telepon/wa/email.

5) Moncaki (Monitoring Capaian Kinerja)

Merupakan aplikasi berbasis google sheet dan google data studio yang menyediakan informasi Capaian Kinerja Unit KPKNL Purwakarta yang dapat diakses secara online oleh Pimpinan maupun oleh seluruh Pegawai KPKNL Purwakarta.

Latar Belakang:

Kebutuhan pimpinan KPKNL Purwakarta untuk mendapatkan informasi Capaian Kinerja KPKNL Purwakarta yang dapat diakses secara online dan kebutuhan seksi Kepatuhan Internal untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan capaian kinerja.

Memberikan informasi capaian kinerja kepada Pimpinan dan seluruh pegawai KPKNL Purwakarta.

Tujuan:

Sebagai alat bantu Seksi Kepatuhan Internal dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja kepada Kanwil dan Kantor Pusat DJKN.

Jenis Inovasi:

Aplikasi berbasis Google Sheet dan Google Data Studio.

6) Pendato (Pendataan Pegawai WFH/WFO)

Merupakan aplikasi berbasis google sheet yang berfungsi untuk mendata pegawai yang akan melaksanakan WFH (Work From Home) atau WFO (Work From Office).

Latar Belakang:

Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor SE-14 tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali 3.

Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-12/MK.1/2021 tentang Penegasan Kembali Ketentuan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND- 994/SJ/2021 tanggal 4 Juli 2021 hal Penegasan Pembatasan Bepergian dan Cuti serta Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tujuan:

Mempermudah pembagian komposisi pegawai WFH dan WFO dan pengajuan usulan pegawai WFH secara kolektif oleh Sub bagian umum.

Memperoleh data untuk Laporan Harian Monitoring Kondisi Pegawai ke Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Jawa Barat.

Sebagai alat bantu pimpinan dalam monitoring pegawai WFH/WFO.

Jenis Inovasi:

Aplikasi berbasis Google Sheet.

7) Monik PPNPM (Monitoring Kehadiran Pegawai PPNPM)

Merupakan aplikasi berbasis google Form yang berfungsi untuk Monitoring Pendataan kehadiran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) secara digital melalui Google Forms (MONIK PPNPN).

Latar Belakang:

Dalam rangka menjalankan protokol kesehatan dan menghindari kontak langsung, maka presensi tidak dapat dilakukan melalui mesin presensi dengan sijek jari, sedangkan belum adanya fitur pada presensi yang digunakan Aparat Sipil Negara untuk PPNPN, maka perlu dibuatkan presensi digital yang memadai bagi PPNPN KPKNL Purwakarta agar dapat menjadi bentuk akuntabilitas kehadiran.

Tujuan:

Menyediakan alat bantu presensi digital yang memadai bagi PPNPN KPKNL Purwakarta agar dapat menjadi bentuk akuntabilitas kehadiran serta sebagai alat bagi pimpinan dalam Monitoring kedisiplinan PPNPM.

Jenis Inovasi:

Aplikasi berbasis Google Form.

8) Sapa Pagi Senin

Kegiatan rutin untuk menguatkan nilai-nilai kementerian keuangan dan bertukar informasi antar pegawai serta evaluasi kegiatan.

Latar Belakang:

Adanya kebutuhan untuk media penanaman nilai-nilai Kementerian Keuangan, budaya kerja Kementerian Keuangan dan kode etik/kode perilaku ASN, sharing session pengetahuan baik terkait tugas pokok dan fungsi maupun pengetahuan lain yang bermanfaat bagi pegawai serta sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas setiap minggu.

Tujuan:

Meningkatkan pemahaman dan pembiasaan pegawai akan nilai2/budaya Kemenkeu serta hak dan kewajiban ASN, serta meningkatkan kompetensi pegawai.

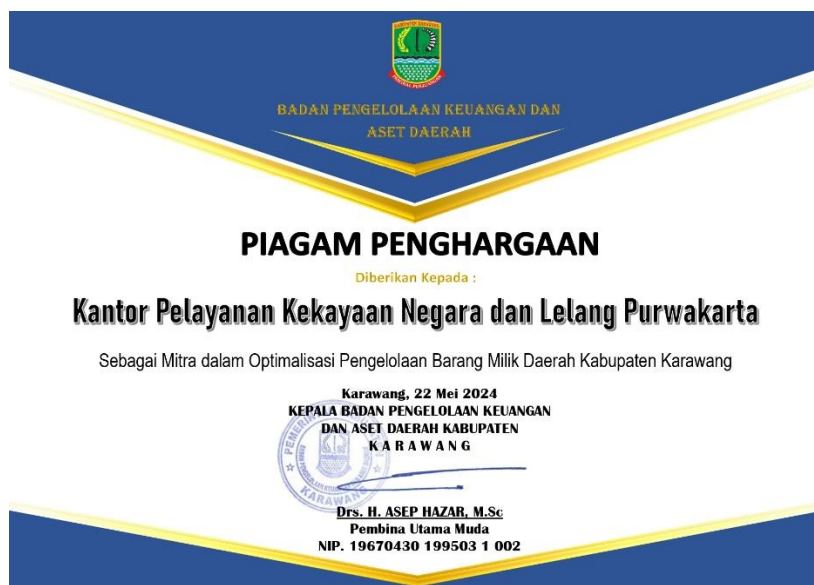
Jenis Inovasi:

Kegiatan Sapa Pagi Senin melalui pertemuan secara daring media Microsoft teams.

2. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024

1) Penghargaan Mitra Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang

Piagam Penghargaan tertanggal 22 Mei 2024, diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Dr. H. Asep Hazar, M.Sc. sebagai apresiasi kepada KPKNL Purwakarta atas peran optimal membantu proses penilaian BMD dalam rangka penertiban BMD pada Kabupaten Karawang.



2) Penghargaan Atas Dukungan Kemajuan UMKM Anggota Rumah BUMN Purwakarta

Piagam Penghargaan tertanggal 15 Mei 2024, diberikan oleh organisasi “Rumah BUMN Purwakarta” kepada KPKNL Purwakarta atas peran aktif mendukung pengembangan dan kemajuan UMKM di Kabupaten Purwakarta melalui sosialisasi dan pemfasilitasan untuk pemasaran produk-produk UMKM baik secara langsung maupun secara elektronik (e-auction).



C. REALISASI ANGGARAN

Dalam hal anggaran, pada Tahun Anggaran 2024 KPKNL Purwakarta mendapat alokasi anggaran awal sebesar **Rp3,233,771,000** (tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh satu ribu rupiah) dan terdapat revisi penghematan belanja perjalanan dinas sesuai arahan dari Kantor Pusat sesuai nota dinas nomor ND-15/KN/KN.1/2024 tanggal 12 November 2024 menjadi sebesar **R3,215,071,000** (tiga miliar dua ratus lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah). Dari total pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2024 tersebut, telah direalisasikan sebesar **Rp3,037,158,607** atau 94,47%. Dalam hal ini telah dilakukan efisiensi sebesar **Rp177,912,393** atau 5,53% dengan realisasi capaian output memenuhi target yang telah ditetapkan dengan rincian, sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	DIPA	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0%
2	Belanja Barang	Rp2,444,216,000	Rp2,271,534,597	92,94%
3	Belanja Modal	Rp770,855,000	Rp765,624,010	99,32%
	Total	Rp3,215,071,000	Rp3,037,158,607	94,47%

Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Purwakarta, sebagai berikut:

Indikator IKU		Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A)	Nilai IKPA (Bobot 50%)			97.58
	1. Revisi DIPA	100.00	10	10.00
	2. Deviasi Hal III DIPA	93.87	15	14.08
	3. Penyerapan Anggaran	95.06	20	19.01
	4. Belanja Kontraktual	100.00	10	10.00
	5. Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00
	6. Pengelolaan UP dan TUP	99.97	10	10.00
	7. Dispensasi SPM	0	0	0
	8. Capaian Output	97.96	25	24.49
B)	Nilai SMART (Bobot 50%)			97.81
	1. Capaian Rincian Output	97.08	75.00%	72.81
	2. Penggunaan SBK	100.00	10.00%	10.00
	3. Efisiensi SBK	100.00	15.00%	15.00
Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan IV				97.70
Realisasi IKU IKKPA Triwulan IV				120.00

BAB IV

PENUTUP

KPKNL Purwakarta yang beralamat di Jalan Siliwangi No 9 Kabupaten Purwakarta merupakan unit vertikal DJKN Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dalam rangka mendukung visi dan misi DJKN sebagai pengelolaan kekayaan Negara. Dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Purwakarta, Karawang, Subang. KPKNL Purwakarta telah melakukan yang terbaik dalam usaha memenuhi target pada indikator-indikator tersebut dengan inovasi-inovasi yang di buat. Perencanaan dan strategi-strategi dibahas pimpinan dengan seluruh pegawai maupun dengan stakeholder, baik dengan Dialog Kinerja Organisasi, Focus Group Discussion, maupun dengan sosialisasi, baik secara *online* maupun *offline*.

Secara umum pada Tahun 2024 KPKNL Purwakarta telah mencapai prestasi kerja yang **sangat baik**. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2024 tercapai sebesar **110,79%**. Sebagian besar target yang telah ditetapkan melalui Indikator-indikator kinerja utama telah terealisasi sesuai atau bahkan melampaui target. Namun terdapat 2 (dua) IKU yang belum mencapai target yaitu IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang serta IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang. Pada IKU Persentase Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang belum mencapai target yaitu berasal dari PNBP Lelang, hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya banyaknya lelang TAP, barang yang dilelang kurang *marketable*, dan daya beli masyarakat yang masih kecil. Disamping itu, KPKNL Purwakarta selama tahun 2024 mendapatkan dua penghargaan yang merupakan buah dari dedikasi tinggi dari seluruh pegawai KPKNL Purwakarta.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, KPKNL Purwakarta juga membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk eksternal maupun internal KPKNL Purwakarta yaitu Percepatan SOP Layanan, Aplikasi Cluster Pusaka (Inovasi dalam pemberian layanan berbasis elektronik berupa permohonan online pengelolaan BMN), Podcast Kanal On Air (Podcast Informasi Seputar Kekayaan Negara dan Lelang via YouTube), Talk To Me Sarana Pengaduan, Aplikasi Moncaki, Aplikasi Monitoring Capaian Kinerja, Aplikasi Pendataan WFH-WFO Pegawai, Aplikasi Monik PPNP (Aplikasi kehadiran pegawai PPNP secara digital), Sapa Pagi Senin.

Pada Tahun 2024 ini, KPKNL Purwakarta mewujudkan keberlanjutan atas Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi yang telah diraih pada tahun 2022. Hal ini dilakukan bersama baik internal pegawai KPKNL Purwakarta maupun seluruh stakeholder di lingkungan KPKNL Purwakarta. Dengan tetap menjaga nilai-nilai kementerian keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan serta menjalankan moto KPKNL Purwakarta yaitu “BAIK”, Bersih, Akuntabel, Inovatif, Konsisten, kami optimis dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

LAMPIRAN

A. Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung 1a – CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: - capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung 1b – CP Indeks integritas		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa 2a – CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa 2b – CP Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.3 Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal 3a – CP Persentase realisasi pokok lelang		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: - capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.3 Persentase penurunan outstanding Piutang Negara 3b – CP Persentase realisasi pokok lelang		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.4 Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien 4a – CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: - capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.5 Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif 5a – CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: - capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.5 Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif 5b – CP Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.6 Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif 6a – CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.6 Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif 6b – CP Persentase produktivitas lelang		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.7 Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional 7a – CP Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.8 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif 8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.8 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif 8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.9 Pengelolaan keuangan yang akuntabel 9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: - capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.9 Pengelolaan keuangan yang akuntabel 9b-CP Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.10 Komunikasi publik yang efektif 10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

SS.11 Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah 11a-N Indeks efektivitas UKI		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 • Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

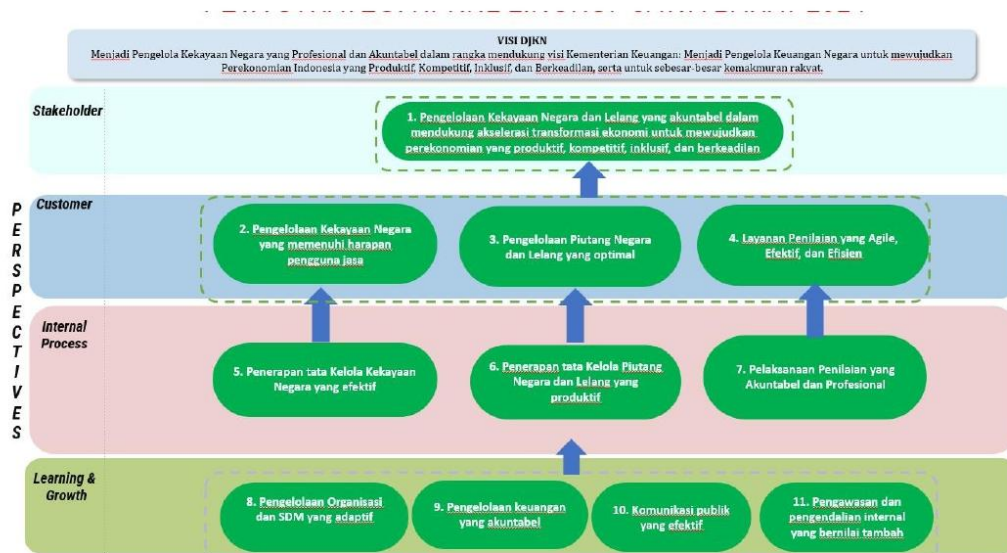
SS.11 Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah 11b-N Tingkat capaian Unit Kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: - capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

B. Kontrak Kinerja 2024



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-04/WKN.08/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp18,27M)
		1b-CP Indeks integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp269,4M)
		3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp200jt)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	86 (25 berkas)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas UKI	82
		11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		Rp	449.966.000
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	6.275.000
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	-
3.	Pengelolaan Aset	Rp	443.691.000
4.	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp	-
5.	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	-
6.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	-
Dukungan Manajemen		Rp	2.565.953.000
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	29.640.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.487.033.000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	32.920.000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	-
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	16.360.000
6.	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp	-

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Taviyanto Noegroho

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Purwakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahjudi Prajogo

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100	97	97	90	90	86	86
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15	40	40	75	75	90	90
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi publik yang efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Purwakarta,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahjudi Prajogo

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Wajudi Prajogo

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (200 jt)	Penerima Layanan
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (879 jt)	Penerima Layanan

B. Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Utama

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sm t.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100 (200 jt)	3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100 (879 jt)

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat,



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo

Bandung, 18 September 2024

Kepala KPKNL Purwakarta



Ditandatangani secara elektronik
Harmani Sri Mumpuni

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-4B/WKN.08/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-4/WKN.08/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-4A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (200 jt)	3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (879 jt)

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							No.	Indikator Kinerja Individu	Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100 (200 jt)	6	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100 (879 jt)

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat,



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo

Bandung, 18 September 2024

Kepala KPKNL Purwakarta



Ditandatangani secara elektronik
Harmani Sri Mumpuni